

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kolonialisme dan imperialisme Inggris di India ditandai dengan diberikannya status kemerdekaan dan pemisahan wilayah bagi dua negara baru di wilayah Asia Selatan. Pada tahun 1947 pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan terbentuknya negara baru yaitu India dan Pakistan. Kemerdekaan India dan Pakistan merupakan babak baru bagi umat Hindu dan umat Muslim di benua India. Namun pada kenyataannya hal ini tidak disertai oleh semangat untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara yang berlainan agama tersebut.

Pemerintah Pakistan dan India yang baru terbentuk menghadapi kendala besar khususnya berhubungan dengan wilayah perbatasan kedua negara. Letak geografis negara Pakistan yang terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur menimbulkan permasalahan tidak hanya bagi pemerintah Pakistan, tetapi juga bagi pemerintah India. Hal ini disebabkan letak geografis antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur berada di antara wilayah India, serta sengketa wilayah Kashmir yang belum menemukan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Kedua hal tersebut pada akhirnya menjadi hambatan bagi kedua negara dalam melakukan hubungan kenegaraan, dan menyebabkan pemerintah India maupun pemerintah Pakistan selalu mewaspadaai setiap tindakan dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh masing-masing negara.

Sejak masa pemerintahan perdana menteri India pertama Jawaharlal Nehru, hingga masa pemerintahan Indira Gandhi, kebijakan luar negeri India berpedoman pada prinsip anti imperialisme dan kolonialisme, serta berusaha menjaga perdamaian dunia (Dutt, 1984: 40). Prinsip ini kemudian dimanifestasikan menjadi sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai kebijakan politik luar negeri non-blok.

Kebijakan non-blok yang diterapkan pada masa pemerintahan Indira Gandhi memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep yang dicetuskan oleh Nehru. Perbedaan tersebut salah satunya tampak dari sifat pragmatis dan fleksibel dalam pelaksanaan kebijakan non-blok. Prinsip tidak memihak tidak lagi menjadi tujuan utama dari kebijakan non-blok, namun pemerintah Indira Gandhi lebih menekankan untuk menguatkan eksistensi India di dunia internasional. Diplomasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai negara menjadi salah satu upaya pemerintah Indira Gandhi untuk mewujudkan peran serta India di lingkungan internasional.

Kebijakan keseimbangan dengan negara besar terutama Amerika Serikat dan Uni Sovyet menjadi salah satu bukti bahwa pelaksanaan kebijakan non-blok pada masa pemerintahan Indira Gandhi bersifat fleksibel. Keputusan untuk tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Uni Sovyet tidak terlepas dari kepentingan nasional India yang dapat tercapai dengan bantuan dari kedua negara tersebut. Namun pada kenyataannya sifat pragmatis dan fleksibel dalam politik luar negeri India menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, baik dari dalam

negeri maupun dari dunia internasional. Esensi kebijakan non-blok yang pada awalnya merupakan sikap tidak memihak pada salah satu negara kuat, menjadi semakin kabur dengan kedekatan hubungan yang terjalin antara pemerintah India, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet.

Kebijakan keseimbangan dengan negara-negara besar serta partisipasi India untuk menjaga perdamaian dunia, pada pelaksanaannya tidak berlaku bagi negara-negara tetangga India, khususnya Pakistan. Dinamika hubungan India-Pakistan pasca perjanjian Taskent tidak menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintahan kedua negara tetap saling mewaspadaikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Ketika pemerintah Pakistan semakin meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat dan China, pemerintah India memberikan respon dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Uni Sovyet. Adanya aliansi baru ini menunjukkan bahwa keterlibatan negara asing menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan India dan Pakistan.

Ketegangan hubungan antara India dan Pakistan mencapai titik kulminasi dengan campur tangan India dalam konflik internal Pakistan. Keputusan pemerintahan Indira Gandhi untuk terlibat dalam konflik internal Pakistan pada tahun 1971 yang berujung pada situasi perang sipil, diikuti oleh perjanjian kerja sama antara India dan Uni Sovyet. Tindakan ini semakin menunjukkan bahwa prinsip non-blok dalam pemahaman Indira Gandhi tidak lagi diartikan sebagai sikap untuk tidak mengikuti salah satu blok atau terikat dengan salah satu negara,

tetapi lebih memilih untuk tetap menjalin hubungan dengan negara manapun yang mendukung tercapainya kepentingan nasional India.

Perang yang terjadi pada tahun 1971 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perang-perang yang terjadi sebelumnya. Perang antara India dan Pakistan pada tahun 1971 bermula dari konflik internal yang terjadi di Pakistan. Konflik yang terjadi antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada dasarnya telah berlangsung sejak awal kemerdekaan yang salah satunya dipicu oleh kondisi geografis antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang terpisah 1000 mil oleh wilayah India (Loshak, 1971: 5).

Kondisi ini menjadi kendala utama dalam menjalin komunikasi antara pemerintah pusat yang berada di Pakistan Barat, dengan pemerintah daerah di Pakistan Timur (Benggala Timur) yang berbatasan dengan wilayah India (Benggala Barat). Selain komunikasi, kendala lain yang mendorong terciptanya konflik ialah kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah pusat di Pakistan Barat yang mayoritas Muslim terhadap rakyat di Pakistan Timur yang lebih heterogen, mendorong munculnya gerakan rakyat yang menuntut otonomi penuh atas Pakistan Timur.

Tuntutan otonomi Benggala Timur mulai diperjuangkan oleh partai Liga Awami di bawah pimpinan Mujibur Rahman pada tahun 1966 dengan program pembaharuan ekonomi dan politik bagi Pakistan Timur. Kemenangan Mujibur Rahman dalam pemilu tahun 1971 tidak ditanggapi secara positif oleh pemerintah

pusat di Pakistan Barat. Penolakan Pakistan Barat terhadap kemenangan Mujibur Rahman diikuti oleh aksi demonstrasi besar-besaran dan serangan militer pemerintah pusat terhadap rakyat di Pakistan Timur. Aksi demonstrasi massa dan bentrokan fisik tersebut berhasil memenjarakan Mujib dan menjatuhkan banyak korban jiwa dari penduduk Benggala Timur, dan jutaan penduduk berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke negara tetangga yaitu Benggala Barat yang termasuk dalam wilayah India. Peristiwa ini menandai dimulainya perang sipil Pakistan, perang kemerdekaan Bangladesh dan perang ketiga antara India dan Pakistan.

Keterlibatan India dalam perang sipil Pakistan bukanlah tanpa alasan, namun didorong oleh situasi mendesak ketika para penduduk Pakistan Timur mengungsi secara besar-besaran ke wilayah India. Wolpert (1989: 388) mengungkapkan jumlah pengungsi dari Pakistan Timur pada akhir bulan April mencapai angka 10 juta jiwa. Kedatangan pengungsi Pakistan Timur ke India dan insiden perbatasan mengakibatkan bergerakinya tentara India ke Pakistan Timur.

Intervensi India dalam perang sipil Pakistan di satu sisi merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang mencerminkan semangat gerakan non-blok. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan India juga dilatarbelakangi oleh adanya perasaan kebangsaan yang bersumber dari budaya dan adanya keterikatan secara psikologis. Keterikatan budaya bahkan keterikatan secara emosional dapat dipahami, karena secara geografis wilayah Benggala Barat dan

Pakistan Timur merupakan suatu kesatuan wilayah yang utuh. Satu-satunya hal yang membedakan penduduk Benggala hanyalah status kewarganegaraan dan wilayah hukum yang mereka tempati, namun dalam pelaksanaannya perbedaan tersebut tidak mengurangi adanya keterikatan budaya dan emosional antara penduduknya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong India membantu perjuangan rakyat di Pakistan Timur.

Upaya India untuk membantu perjuangan rakyat di Pakistan Timur tidak sebatas pengiriman tentaranya saja, tetapi juga melakukan diplomasi kepada negara-negara lain di dunia, termasuk mengajukan usul kepada Dewan Keamanan PBB untuk ikut mengamankan wilayah dan menyerukan penolakan terhadap penindasan rakyat di Pakistan Timur. Pemerintah India juga mulai melakukan pendekatan terhadap Uni Soviet dan mengajak pemerintahnya menggunakan keanggotaannya di PBB untuk membujuk negara-negara anggota PBB lainnya, dalam upaya menghentikan perang sipil di Pakistan.

Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indira Gandhi dalam rangka mencari dukungan bagi Pakistan Timur, mendapat reaksi dari pemerintah Amerika Serikat dan China yang lebih berpihak kepada pemerintah Pakistan Barat pimpinan Jenderal Yahya Khan. Dukungan pemerintah Amerika Serikat ini merupakan sesuatu yang wajar, karena sejak tahun 1950-an Pakistan memutuskan untuk bergabung dengan pakta pertahanan militer Amerika Serikat (Wolpert, 1989: 373). Keputusan Pakistan memihak Blok Barat menyebabkan pemerintah Amerika Serikat di Washington memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada

pemerintah Pakistan. tidak terkecuali pada saat Pakistan mengalami masa perang saudara.

China dan Amerika Serikat mengajukan usulan untuk menempatkan dewan keamanan PBB di wilayah perbatasan India. Tindakan kedua negara tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah Pakistan Barat, namun di sisi lain dianggap sebagai ancaman bagi India (Brown, 1972: 222). Adanya dukungan kepada pemerintah Pakistan Barat, menyebabkan pemerintah Indira Gandhi semakin mempererat hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet dalam bentuk penandatanganan perjanjian persahabatan antara India dan Uni Sovyet untuk kurun waktu 20 tahun. Kesepakatan antara India dan Uni Sovyet yang ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1971 di New Delhi, bertujuan untuk menjaga integritas teritorial India dan menjaga perdamaian dunia yang mulai terancam dengan adanya perang sipil di Pakistan (Bindra, 1981: 140).

Keputusan Perdana menteri Indira Gandhi untuk terlibat langsung dalam perang saudara di Pakistan di satu sisi merupakan aplikasi dari politik luar negeri yang menekankan pada prinsip penolakan terhadap imperialisme, kolonialisme, dan segala bentuk penindasan. Namun di sisi lain, dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama dengan Uni Sovyet untuk kurun waktu 20 tahun, menunjukkan sikap tidak konsisten pemerintah India dan merupakan kemunduran bagi politik luar negeri non-blok. Keterlibatan pemerintah India dalam perang sipil Pakistan dan keputusan untuk berkoalisi dengan pemerintah Uni Sovyet telah merubah pandangan dunia internasional terhadap India. Bagi Amerika Serikat dan

Cina, keberadaan India mulai diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Selatan. Namun tidak sedikit negara-negara di dunia pertama, termasuk PBB, memberikan reaksi negatif terhadap tindakan pemerintah India yang dianggap telah melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain (Srivastava, (1999). [Online]. Tersedia: <http://www.hinduonnet.com/flinc> [7 April 2006]). Keputusan perdana menteri Indira Gandhi juga telah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya mempertanyakan kembali politik luar negeri India.

Hubungan antara India dan Pakistan pasca perang sipil Pakistan juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sikap waspada menjadi hambatan bagi terciptanya hubungan yang lebih baik antar kedua negara. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa prinsip perdamaian yang dipegang oleh pemerintah India seolah tidak berlaku lagi jika sudah berhubungan dengan Pakistan.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai politik luar negeri India terhadap Pakistan pada masa pemerintahan Indira Gandhi, khususnya ketika India memutuskan untuk terlibat langsung dalam perang sipil Pakistan tahun 1971. *Pertama*, penulis merasa tertarik untuk mengkaji perkembangan hubungan antara India dan Pakistan karena secara keseluruhan dinamika hubungan antar kedua negara selalu diwarnai oleh konflik dan masalah perbatasan. Konflik yang terjadi antara kedua negara tidak dapat dilepaskan dari sikap yang diambil masing-masing negara dalam menghadapi negara lainnya, atau dengan kata lain

bagaimana kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan maupun sebaliknya. India sebagai negara dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Selatan, menjadikannya negara yang cukup diperhitungkan di benua tersebut. Oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukannya akan mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara-negara sekitarnya.

Kedua, India menjadi salah satu negara yang mempelopori kebijakan non-blok. Kebijakan luar negeri ini mulai diberlakukan oleh perdana menteri India pertama, Jawaharlal Nehru, sebagai reaksi penolakan terhadap posisi yang disimbolkan oleh persaingan antara dua kekuatan besar dunia pada saat itu yaitu Amerika Serikat (AS) dan Uni Sovyet. Secara politis keputusan untuk tidak memihak pada blok manapun sebenarnya cukup membingungkan, karena hal ini berarti India dan negara-negara lain yang memiliki prinsip sama membentuk blok sendiri. Kebijakan luar negeri non-blok pada pelaksanaannya tetap dipertahankan oleh perdana menteri India selanjutnya, tidak terkecuali pada masa pemerintahan Indira Gandhi. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan luar negeri non-blok mengalami perubahan yang ditandai dengan keputusan perdana menteri Indira Gandhi untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Uni Sovyet. Hal ini menunjukkan sikap tidak konsisten pemerintah India terhadap kebijakan luar negerinya, khususnya jika berhubungan dengan Pakistan.

Alasan *ketiga* ialah adanya harapan penulis agar pengkajian politik luar negeri India terhadap Pakistan pada saat terjadinya perang sipil di Pakistan, dapat

dijadikan sebagai wacana konsumtif untuk kondisi bangsa Indonesia yang rentan terhadap bahaya konflik yang mengarah pada bentuk disintegrasi bangsa. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penulis mengangkat masalah ini untuk dikaji lebih jauh secara akademik dengan harapan dapat dipahami lebih mendalam dan menjadi pelajaran bagi bangsa manapun yang terancam bahaya konflik. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: *"Kebijakan Politik Luar Negeri India Pada Masa Pemerintahan Indira Gandhi: Kajian terhadap Keterlibatan India dalam Perang Sipil Pakistan 1971"*.

I. 2. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Secara umum penulisan skripsi ini membahas politik luar negeri India pada masa pemerintahan Indira Gandhi. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini ialah "Mengapa India terlibat dalam perang sipil di Pakistan pada tahun 1971?". Untuk lebih memfokuskan kajian dalam penelitian ini, maka penulis membatasinya dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa karakteristik politik luar negeri India pada masa pemerintahan perdana menteri Indira Gandhi 1966-1971?
2. Bagaimana sikap pemerintah India terhadap Pakistan barat?
3. Mengapa pemerintah India memihak perjuangan rakyat di Pakistan Timur?

4. Apa dampak dari keterlibatan India dalam perang sipil Pakistan terhadap hubungan politik luar negeri antara kedua negara pasca perang sipil tahun 1971?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul, "Kebijakan Politik Luar Negeri India Pada Masa Pemerintahan Indira Gandhi: Kajian terhadap Keterlibatan India dalam Perang Sipil Pakistan tahun 1971". pada umumnya bertujuan untuk memperkaya wawasan diplomasi antara India dan Pakistan, khususnya ketika terjadi konflik antara kedua negara tersebut. Pembahasan mengenai keterlibatan India dalam perang sipil Pakistan tahun 1971 tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri India terhadap Pakistan, begitu pula sebaliknya. Dengan mengkaji gambaran umum politik luar negeri India terhadap Pakistan diharapkan dapat lebih memahami konflik yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut, khususnya ketika terjadi perang sipil di Pakistan pada tahun 1971.

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik politik luar negeri India pada masa pemerintahan perdana menteri Indira Gandhi.
2. Mengungkapkan sikap pemerintahan Indira Gandhi terhadap Pakistan Barat.
3. Mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah India dalam membantu perjuangan rakyat Pakistan Timur.

4. Mengungkapkan dampak keterlibatan India dalam perang sipil di Pakistan terhadap hubungan luar negeri antara India dan Pakistan pasca perang sipil tahun 1971.

I. 4. Penjelasan Judul

Judul skripsi yang akan dibahas ialah, “ *Kebijakan Politik Luar negeri India Pada Masa Pemerintahan Indira Gandhi: Kajian terhadap Keterlibatan India dalam Perang Sipil Pakistan Tahun 1971*”. Pada judul skripsi tersebut terdapat beberapa istilah yang menggunakan konsep-konsep ilmu politik, ilmu sosiologi, dan ilmu hubungan internasional, sehingga untuk memperjelas maksud yang terkandung dalam judul skripsi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut.

Politik luar negeri menurut Olton dan Plano (1990: 5) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Perang dalam sudut pandang ilmu sosiologi adalah konflik antara unit-unit politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan angkatan bersenjata, atau konflik terorganisasikan antara beberapa komunitas (Sockanto, 1985: 541). Pengertian perang dalam sudut pandang ilmu politik ialah kondisi legal ketika dua atau lebih bangsa atau negara yang bermusuhan menyelesaikan konflik dengan kekuatan bersenjata (Krisna, 1993: 121). Dari kedua pengertian

menurut sudut pandang ilmu sosiologi dan ilmu politik tersebut dapat disimpulkan bahwa perang merupakan bentrokan fisik antara dua kekuatan atau dua pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Adapun pengertian bentuk perang yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini ialah perang sipil atau perang saudara. Menurut sudut pandang ilmu hubungan internasional perang sipil diartikan sebagai suatu perang diantara kelompok yang berbeda kawasan, berbeda politik, atau diantara fraksi-fraksi ideologi di dalam sebuah negara (Olton dan Plano, 1990: 142). Perang saudara dapat mencakup pertentangan antara pemerintah dengan kekuatan anti pemerintah, atau dapat berkembang pada masa peralihan menuju pemerintahan baru yang berlangsung diantara pihak pesaing dalam menduduki kekuasaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perang sipil atau perang saudara dapat diartikan sebagai perang antara dua kekuatan dalam satu bangsa atau satu negara. Perang yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini ialah perang saudara atau perang sipil antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur, atau lebih dikenal sebagai perang sipil Pakistan tahun 1971. Perang yang terjadi antara dua wilayah dalam satu negara ini berkembang menjadi perang antar negara karena adanya keterlibatan negara-negara lain yang memiliki kepentingan berbeda terhadap konflik yang terjadi di Pakistan. India merupakan negara yang terlibat langsung dalam perang saudara antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur.

Keterlibatan India dalam perang sipil di Pakistan merupakan upaya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan negaranya, yang telah terancam dengan adanya perang sipil di Pakistan pada tahun 1971. Intervensi India dalam konflik internal di Pakistan menyebabkan India mengalami peperangan dengan Pakistan untuk ketiga kalinya, sehingga perang sipil Pakistan tahun 1971 dikenal juga sebagai perang antara India dan Pakistan.

1. 5. Metode dan Teknik Penulisan

1. 5. 1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode historis atau metode sejarah. Menurut Gottschalk (1986: 32) metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi rekaman dan peninggalan masa lampau dilakukan secara kritis dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismaun (1992: 17), yang terdiri dari:

1. Heuristik

Pada tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Pembahasan mengenai keterlibatan India dalam perang sipil Pakistan tahun 1971 tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri antara kedua negara tersebut, sehingga sumber yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan buku-buku yang membahas politik luar negeri India dan Pakistan. Sumber yang digunakan dalam mengkaji bahasan tersebut terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Salah satu contoh sumber primer yang penulis gunakan ialah buku dengan judul *Indira Gandhi Speeches and Writings* yang ditulis oleh Indira Gandhi sendiri dan diterbitkan pada tahun 1975. Buku-buku lain yang digunakan lebih banyak ditulis oleh praktisi pendidikan khususnya dosen-dosen ilmu politik di India, antara lain J. Bandyopdhyaya dalam *The Making of India's Foreign Policy: Determinants, institutions, Processes and Personalities* (1980), Dutt dalam *India's Foreign Policy* (1984), dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri India.

Jenis sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa sumber tertulis yaitu literatur dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan politik luar negeri India pada masa pemerintahan Indira Gandhi dan bagaimana aplikasi dari politik luar negeri tersebut khususnya menghadapi konflik dalam negeri Pakistan pada tahun 1971 yang melibatkan India di dalamnya. Sumber-sumber primer dan sekunder didapatkan dengan mengunjungi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Asia Afrika, Perpustakaan Angkatan Darat, Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Perpustakaan UPI. Selain itu juga penelusuran melalui internet dilakukan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang akan dibahas.

2. Kritik

Penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dilakukan terhadap sumber utama dan buku penunjang lainnya. Sjamsuddin (1996: 118) menjelaskan bahwa fungsi kritik sumber sejarawan sangat erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu dalam rangka mencari kebenaran. Kritik tersebut secara umum dibagi menjadi dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Penulis melakukan kritik ekstern dengan cara menelusuri latar belakang dari penulis buku-buku sumber dan melihat tahun penerbitan sumber-sumber yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi. Kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan isi buku atau sumber lain dengan tujuan untuk memperoleh kelemahan maupun kelebihan dari sumber yang akan digunakan dalam penulisan skripsi. Melalui proses ini juga dapat diketahui sejauhmana subjektifitas penulis buku dalam membahas permasalahan yang dikaji dalam buku tersebut.

Kritik sumber juga dilakukan terhadap sumber-sumber yang berasal dari internet. Hal ini dilakukan karena sumber yang diperoleh dari internet terdiri dari beberapa website, baik India, Pakistan, dan Bangladesh. Dari beberapa website tersebut tentunya terdapat perbedaan dalam informasi yang diberikan. Oleh karena itu untuk menghindari sumber internet dengan tingkat subyektifitas yang tinggi, dilakukan upaya identifikasi terhadap latar belakang penulis artikel, yang salah satunya dapat dilihat dari asal negara serta latar belakang pendidikan dari

penulis artikel. Cara lain yang dapat digunakan dalam rangka kritik sumber ialah dengan melakukan *cross checking* antara sumber internet dengan buku-buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan. Setelah melakukan kritik sumber, maka akan diperoleh fakta-fakta mengenai keterlibatan India dalam perang sipil Pakistan tahun 1971.

3. Interpretasi

Tahapan interpretasi dilakukan karena adanya perbedaan penafsiran dari berbagai sumber yang diperoleh. Perbedaan penafsiran ini muncul dari para penulis buku dari India dan Pakistan, yang memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi suatu peristiwa. Selain itu data-data yang diperoleh melalui proses heuristik dan kritik dalam penelitian ini, memiliki keragaman yang perlu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan urutan waktu peristiwa dan terjamin keobjektifannya.

Penulis juga menggunakan pendekatan dalam mengkaji permasalahan, dengan maksud untuk mempermudah penelitian yang dilakukan. Suatu penelitian tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antar disiplin ilmu, atau pendekatan interdisipliner yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Hal ini bertujuan agar dapat mengungkap peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian penyusunan skripsi ini dilakukan dengan meminjam konsep-konsep ilmu sosial lainnya. Penulis menggunakan konsep ilmu politik dan ilmu hubungan internasional seperti konsep perang dan diplomasi untuk menjelaskan

hubungan bilateral antara India dan Pakistan pada tahun 1971, dan konsep disintegrasi dari ilmu sosiologi digunakan oleh penulis dalam memaparkan perang sipil Pakistan tahun 1971.

4. Historiografi

Data-data yang telah dikumpulkan, diseleksi (melalui proses kritik), kemudian ditafsirkan, pada akhirnya harus disusun kembali menjadi suatu kisah sejarah yang ilmiah, atau dinamakan historiografi. Pada tahap penulisan sejarah atau historiografi inilah penulis mencoba untuk mensintesa, menghubungkan dan menggunakan daya analitis kritis untuk memecahkan permasalahan dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada kedalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul, *“Kebijakan Politik Luar Negeri India Pada Masa Pemerintahan Indira Gandhi: Kajian terhadap Keterlibatan India dalam Perang Sipil Pakistan 1971”*.

1.5.2 Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan cara mempelajari sumber-sumber yang terkumpul dalam bentuk tulisan atau sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, metode dan teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan.

Bab ini berisi tentang pemaparan beberapa sumber-sumber kepustakaan yang digunakan untuk mendukung permasalahan yang di kaji.

Bab III Metode Penulisan dan Teknik Penelitian.

Bab ini menguraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber-sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang di kaji.

Bab IV Penerapan kebijakan politik luar negeri India pada masa pemerintahan Indira Gandhi (1966-1971)

Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh. Didalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

Bab V Kesimpulan.

Pada bab ini akan dikemukakan tentang hasil temuan dan pandangan penulis tentang keterlibatan India dalam Perang Sipil Pakistan, dan bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi.

